

---

**MANAJEMEN KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN  
(SD ISLAM AL-MUHAJIR RANDUAGUNG LUMAJANG)**

**Riska Nurjannah<sup>1</sup>, Abdul Mu'is<sup>2</sup>, Khotibul Umam<sup>3</sup>**  
Email: [riska.nurjannah19@gmail.com](mailto:riska.nurjannah19@gmail.com)<sup>1</sup>, [pasca@uinkhas.ac.id](mailto:pasca@uinkhas.ac.id)<sup>23</sup>  
**UIN KHAS JEMBER**

**ABSTRAK**

Lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama yang ada di dalam lembaga pendidikan bisa optimal apabila di dalam lembaga pendidikan tersebut dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep manajemen keuangan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam, sehingga bisa menemukan formulasi baru dalam manajemen pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana prinsi-prinsip manajemen keaungan SD Islam Al-Muhajir Lumajang? 2) Bagaimana pengelolaan manajemen keaungan SD Islam Al-Muhajir Lumajang? Hasil penelitian ini menemukan bahwa, manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam SD Islam Al-Muhajir bersifat terbuka dan adanya controlisasi yayasan dan memiliki 3 sumber keuangan yaitu pemerintah, masyarakat, dan murid/wali murid. Berdasarkan hal tersebut sangat penting dalam manajemen keuangan Lembaga Pendidikan Islam karena sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan kedepannya.

**Kata Kunci:** Manajemen Keuangan, Lembaga Pendidikan Islam

## **PENDAHULUAN**

Lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan bersama yang ada di dalam lembaga pendidikan bisa optimal apabila di dalam lembaga pendidikan tersebut dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaan.

Seperti yang telah kita pelajari manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia dan manajemen keuangan. Dalam pembahasan ini kita memasuki pembahasan manajemen keuangan. Manajemen keuangan di lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan segala aktivitas di lembaga pendidikan, karena semua aktivitas lembaga pendidikan memerlukan anggaran keuangan. Anggaran keuangan akan teratur jika dikelola atau di manajemen dengan baik.

Sebagaimana manajemen yang lainnya, manajemen keuangan juga mempunyai tujuan yang harus dicapai, yaitu untuk sebuah keefektifan dalam hal penggunaan uang serta menghindari pelanggaran aturan. Selain itu agar dapat melaporkan keuangan secara aktual dan transparan. mengatur keuangan dilakukan secara menyeluruh agar kebutuhan pembiayaan aktivitas lembaga pendidikan dapat dilakukan secara efektif, diupayakan adanya pembukuan yang transparan serta dapat dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas lembaga pendidikan.

Manajemen keuangan lembaga pendidikan yang baik sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan, karena sangat berpengaruh pada semua aktivitas lembaga pendidikan yang berjalan untuk jangka panjang misalkan pengembangan aktivitas siswa yang membutuhkan anggaran, sehingga siswa merasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan prestasinya ataupun biaya oprasional lembaga pendidikan misalsalnya pengembangan kualitas pendidikan dari segi sarana prasarana, investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi sekolah/madrasah mencakup: a). Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, c). Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak asuransi dan lain-lain. Standar biaya operasi madrasah ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua lembaga pendidikan. Hanya saja substansi pelaksanaannya yang beragam antara lembaga pendidikan atau sekolah yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya lembaga umum dengan lembaga pendidikan yang berlatar belakang keislaman. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas dan berdasarkan Mata Kuliah Manajemen Institusi Pendidikan Islam, dalam pembahasan makalah ini penulis akan membahas tentang “Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam Dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan (Sekolah Dasar Islam Al-Muhajir Randuagung Lumajang)”.

## **METODE**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian di Yayasan Al-Muhajir secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (1992) yang mengungkapkan bahwa teknik analisis data kualitatif, yang pada prosedurnya yaitu: reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan**

Manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan. Sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dalam lembaga pendidikan, dapat dicontohkan pada manajemen keuangan di sekolah yaitu dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

#### **1. Informasi Manajemen Keuangan**

Informasi manajemen keuangan merupakan suatu konsep yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan secara efektif, di dalam sebuah lembaga ada tiga informasi manajemen keuangan yang diperlukan, yaitu:

- a. Manajemen strategis, yaitu membuat keputusan yang tepat untuk pemilihan produk, metode proses, teknik, saluran pemasaran dan hal-hal yang bersifat jangka panjang yang diperlukan didalam lembaga.
- b. Perencanaan dan pengambil keputusan, hal ini untuk mendukung keputusan yang terus menerus seperti memindah perlatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan dan penjadwalan pembangunan.
- c. Penyusunan laporan keuangan, yaitu informasi manajemen keuangan harus memberikan catatan yang akurat tentang persediaan dan aset yang dimiliki lembaga.

#### **2. Dasar Hukum Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan**

Dasar hukum manajemen keuangan lembaga pendidikan telah diatur dalam PP No.48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4, didalamnya menjelaskan:

- a. Biaya pendidikan meliputi:
  - 1) Biaya satuan pendidikan
  - 2) Biaya penyelenggaraan atau pengelola pendidikan
  - 3) Biaya pribadi peserta didik
- b. Biaya satuan pendidikan:
  - 1) Biaya invertasi, terdiri dari: biaya isventasi lahan pendidikan, biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - 2) Biaya operasi, terdiri dari: biaya personalia dan nonpersonalia
  - 3) Bantuan biaya pendidikan
  - 4) Beasiswa
- c. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya insventasi selain lahan pendidikan yaitu biaya operasi yang terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
- d. Biaya personalia meliputi gaji pokok pegawai, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan struktural, tunjangan fungsional.

#### **3. Prinsip-prinsip manajemen keuangan**

Pembiayaan pendidikan perlu untuk disusun dan dibikin sebaik mungkin karena dengan disusun standar pembiayaan maka akan menjadikan pengeluaran menjadi lebih terarah, baik yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan biaya operasional, biaya investasi

maupun biaya personal. Oleh karena itu sangatlah penting lembaga pendidikan memiliki prinsip-prinsip manajemen keuangan agar terarah dengan benar, berikut beberapa prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu:

a. Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi (keterbukaan) merupakan sifat terbuka dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan lembaga. Transparansi keuangan sangat penting adanya bagi semua pihak yang dianggap perlu untuk mengetahui kondisi keuangan dalam suatu lembaga. Dengan adanya transparansi juga akan memberikan dan menguatkan kepercayaan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua dengan cara yang mudah saat mengakses informasi-informasi keuangan pendidikan.

b. Akuntabilitas

Yaitu kemampuan dalam menggunakan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 3 syarat adanya akuntabilitas yakni: adanya keterbukaan pengelola pendidikan dalam memberikan masukan dan partisipasinya di setiap kegiatan sekolah, terdapat standar dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai fungsi, wewenang, dan tugasnya, keikutsertaan dalam menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dengan menyediakan layanan pendidikan yang murah dan prosedur yang tidak berbelit-belit.

Hal ini ditunjang oleh wawancara kepada Kepala Sekolah SD Islam Al-Muhajir tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan yang salah satunya adalah akuntabilitas.

“SDI Al-Muhajir ini berada di bawah naungan Yayasan dan bersifat sekolah swasta, sehingga dalam manajemen keuangan selalu ada keterbukaan, dan menerima wewenang dari Ketua Yayasan. Dan adanya sistem yang mengatur dari semua sektor, sehingga kontrolisasi dari yayasan selalu ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa SD Islam Al-Muhajir adalah lembaga pendidikan swasta yang ada di bawah naungan yayasan, sehingga manajemen keuangan bersifat terbuka dan adanya kontrolisasi yayasan.

c. Efektivitas

Yaitu keberhasilan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Manajemen pembiayaan atau keuangan dapat dinilai keefektifannya ketika berhasil membiayai dan mengatur keuangan dengan tepat saat menyelenggarakan kegiatan yang berkualitas.

d. Efisiensi

Yaitu adanya pengeluaran dan pemasukan seimbang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien ketika dapat menggunakan tenaga, waktu, dan biaya dengan tepat guna, akan tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam, dibutuhkan kesesuaian antara teknis pelaksanaan, prinsip, etika, dan tujuan agar pengelolaan keuangan bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi.

### **Konsep Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam**

1. Sumber keuangan pendidikan islam

Secara garis besar sumber keuangan lembaga pendidikan islam ada 3, yaitu:

a. Pemerintah

Dana yang bersumber dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat atau daerah. Dana tersebut bisa bersifat khusus atau umum yang dimanfaatkan kepentingan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 menjelaskan pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah. Dalam hal ini dapat dicontohkan sekolah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini dikuatkan dengan wawancara kepada Tenaga Kependidikan SD Islam Al-Muhajir “Dana yang bersumber dari pemerintah di sekolah ini adalah Dana Bantuan

Oprasional Sekolah (BOS), namun pengelolaannya tidak hanya pada gaji guru karena tidak semua guru disini masuk pada data dinas pendidikan. Jadi dana BOS alokasinya pada gaji guru yang masuk Dapodik dan di alokasikan kepada biaya operasional lainnya salah satunya pengembangan sarana prasarana sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah sumber dana dari pemerintah di SD Islam Al-Muhajir ini BOS, yang dikelola sebagai gaji guru yang sudah terdata di dapodik dan di alokasikan kepada pengembangan sarana prasarana sekolah.

b. Masyarakat

Pendanaan yang berasal dari masyarakat yang bersifat sukarela baik yang dikeluarkan secara pribadi maupun kelompok.

1) Kerjasama usaha

Usaha tersebut bisa dibangun secara mandiri atau secara kerja sama dengan pengusaha. Jika dana telah masuk pada lembaga pendidikan, maka manajer lembaga tersebut harus berusaha mengembangkan dengan cara mendirikan beberapa usaha yang produktif. Dengan seni manajerial, kepala sekolah yang kreatif dalam menggali dana, ketika telah membuahkan suatu hasil harus digunakan secara jujur dan terbuka, kemudian mengembangkan dengan cara yang produktif serta hasil dari usaha mandiri tersebut, harus digunakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Pengelolaan usaha mandiri yang benar akan membantu kemajuan dan menambah sumber keuangan lembaga pendidikan tersebut.

Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara kepada Tenaga Kependidikan bidang Koperasi.

“Kerjasama usaha lembaga pendidikan dengan mitra itu sangat penting karena salah satu manfaatnya adalah menambah sumber dana yang akan menjadi pemajukan lembaga pendidikan. Ada beberapa mitra yang bekerjasama dengan koperasi disini yaitu PT Ice Cream Today, Agen Snack dan masyarakat sekitar yang biasanya menitipkan jajanan anak sekolah yang berkemas higienis”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa SD Islam Al-Muhajir ini bekerjasama usaha sehingga dapat menambah sumber pemasukan sekolah.

2) Wakaf

Wakaf adalah dana yang sering disebut dengan sumbangan. Secara umum diartikan sebagai hadiah yang diperuntukkan mencukupi keperluan spiritual kaum muslimin, dan sarana umum. Misalnya, dari dana sumbangan tersebut dimanfaatkan untuk mendirikan rumah sakit dan sekolah, membangun dan merawat tempat ibadah. Dalam hal ini dapat dicontohkan, salah satu masyarakat setempat mewakafkan sekian hektar tanah kepada lembaga pendidikan, untuk dikelola sehingga didirikan lembaga pendidikan ditanah wakaf tersebut.

Hal ini di kuatkan oleh wawancara dengan Ketua Yayan Sd Islam Al-Muhajir Randuagung Lumajang.

“Awal Mulanya lembaga pendidikan ini terbentuk dari Taman Pendidikan AlQur’an dan Madrasah Diniyah. Lambat laun dengan kebutuhan masyarakat yang menyarankan kepada kami untuk mendirikan lembaga pendidikan formalsehingga kami mendirikan SD Islam ini, dan sesuai kesepakatan keluarga agar tempat tidak terlalu jauh dari pendidikan sebelumnya maka lahan yang di bangun SDI Al-Muhajir ini adalah tanah waqof keluarga yang berada di sekitar TPQ dan Diniyah ini”.

Berdasarkan hasil wawancara ini bahwa lahan yang di bangun SD Islam Al-Muhajir adalah tanah waqof keluarga yang di amanahkan kepada Ketua Yayasan.

3) Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun islam ini dapat dijadikan sebagai sumber biaya pendidikan. Zakat yang sudah dikumpulkan harus dikelola secara

transparan dan profesional oleh lembaga pendidikan.

c. Wali murid atau orang tua peserta didik

Dana pendidikan yang berasal dari orang tua siswa merupakan pembiayaan wajib yang dilakukan. Pembiayaan ini diistilahkan dengan kata dana komite. Secara umum, dana komite dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Dana syariah merupakan pembiayaan wajib yang harus dilengkapi oleh orang tua siswa di setiap bulan selama masih terdaftar menjadi peserta didik
- 2) Dana incidental yaitu pembiayaan wajib yang dibebankan pada siswa satu sekali selama menjadi peserta didik
- 3) Dana sumbangan sukarela ialah biaya yang diberikan secara sukarela oleh orang tua peserta didik.

Hal ini di kuatkan dengan wawancara kepada bendahara SD Islam Al-Muhajir Randuagung Lumajang.

“Dana komite SD Islam Al-Muhajir ada 3 yaitu: 1) Dana Syariah yang dinamai Kartu Menuju Surga (KMS) dana ini di kelola untuk pengembangan sarana prasarana, gaji guru yang belum terdaftar di Dapodik, dan pengembangan pembangunan seperti halnya tahun ini adalah paving halaman sekolah. 2) Dana Incidental, yang di bayar siswa setiap tahun ajaran baru, dana ini di kelola untuk keperluan siswa seperti buku panduan siswa, atribut sekolah dan pengembangan belajar dan bakat minat siswa. 3) Dana suka rela, di SDI Al-Muhajir ini di contohkan pembelajaran siswa untuk berinfaq setiap hari di kelasnya masing-masing, dana ini di alokasikan kepada Baksos sekolah setiap akhir tahun”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dana komite SD Islam Al-Muhajir bersal dari dana syariah/KMS, dana incidental/dana daftar ulang, dan dana sukarela/infaq siswa setiap harinya.

2. Etika dalam manajemen lembaga pendidikan islam

Etika dalam suatu organisasi pendidikan sudah semestinya tidak ditinggalkan, terutama dalam manajemen keuangan. Dalam penerapan manajemen keuangan, terdapat etika yang harus dipatuhi oleh pelaksananya. Seorang yang diberi kewenangan keuangan lembaga pendidikan islam harus memiliki etika sebagai berikut:

- a. Integritas, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan pada seseorang, integritas, kompetensi, kemampuan dan kualifikasi ditempatkan pada posisi dengan nilai tertinggi dalam mengarahkan perilaku seorang muslim.
- b. Keikhlasan, dalam melaksanakan tugas sebagian pengelola keuangan, seseorang tidak boleh tunduk pada pengaruh dan tekanan dari luar. Selain itu dalam pelaksanaannya harus dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, maka diperlukan adanya komitmen dalam beragama, ibadah dalam menjalankan tugasnya.
- c. Ketakwaan, takwa adalah sikap meyakini bahwa setiap gerakannya selalu diawasi oleh Allah dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan. Seorang yang bertakwa selalu mempertimbangkan perilakunya apakah disukai Allah atau tidak. Hal itu menjadi cara untuk melindunginya dari resiko dari perilaku yang tidak dibenarkan oleh syariah. Ketakwaan sangat perlu ditanamkan pada seorang yang tugasnya berkaitan dengan penggunaan kekayaan atau transaksi. Oleh karena hal itu, sesuatu yang sangat memungkinkan berbuat dzalim dan tidak sesuai dengan syariah. Ketakwaan merupakan pengawas diri agar kuat dalam menghadapi godaan yang berasal dari profesinya. Untuk menanamkan sikap takwa ini, selain diusahakan dengan menerapkan kode etik profesi rasional, tetapi juga harus didasari oleh motivasi diri sendiri dengan memupuk kepercayaan dan keyakinan akan adanya Allah yang selalu mengawasi perbuatan kita.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa: Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan dan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dalam lembaga pendidikan SD Islam Al-Muhajir ada pada manajemen keuangan di sekolah yaitu dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah. Dalam konsep manajemen keuangan lembaga pendidikan islam SD Islam Al-Muhajir ini sumber keuangan didapatkan dari pemerintah, masyarakat yang meliputi kerjasama usaha, zakat, dan wakaf, serta sumber dana yang didapatkan dari wali murid berdasarkan ketentuan-ketentuan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 48 Tahun 2008.” Diakses 27 Maret 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/4862>.
- Eferi Ardi, 2012, Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterbatasan Anggaran, Yogyakarta: Idea Press
- Hidayat, Rahmat, dan Candra Wijaya. Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam. Disunting oleh Achyar Zein. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/2835/>.
- “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah.” Diakses 26 Maret 2024. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=O0\\_I2u8AAAAJ&citation\\_for\\_view=O0\\_I2u8AAAAJ:d1gkVwhDpl0C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=O0_I2u8AAAAJ&citation_for_view=O0_I2u8AAAAJ:d1gkVwhDpl0C).
- “Manajemen pendidikan / Dr. Maisah, M.Pd.I | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Diakses 27 Maret 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=28250>.
- Manajemen pendidikan Islam: konsep, strategi dan aplikasi | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Diakses 26 Maret 2024. [//opac.uin-antasari.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D14585%26keywords%3D](https://opac.uin-antasari.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D14585%26keywords%3D).
- Minarti, Sri. Manajemen sekolah: mengelola lembaga pendidikan secara mandiri/ Sri Minarti. Cet. 1. Ar-Ruzz Media, 2011.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Remaja Rosdakarya, 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id>.
- “Permen15-2007SPT.pdf.” Diakses 26 Maret 2024. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen15-2007SPT.pdf>.
- Qomar, Mujamil. Manajemen Pendidikan Islam: strategi baru pengelolaan lembaga Pendidikan Islam. Erlangga, 2007.
- VISIMEDIA. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional & Undang-undang Nomor 14 Thn. 2005 tentang Guru dan Dosen. Visimedia, 2009.